

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 KESIMPULAN

Pembentukan kebijakan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) Indonesia di sektor energi merupakan kebijakan hasil dari interaksi berbagai faktor yang pada akhirnya menjadikan kebijakan NEK di sektor energi Indonesia membentuk arah kebijakan nasional Indonesia dalam upaya penanggulangan perubahan iklim. Dengan analisis dalam penelitian ini menggunakan teori kebijakan luar negeri yang dijabarkan oleh Paul G. Harris, yaitu menggunakan aspek dan analisis *ideas-based state-centric theory*. Teori ini menjadi alat analisis dalam penelitian untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pembentukan kebijakan luar negeri terkait perubahan iklim di suatu negara. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan *ideas-based state-centric theory* untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pembentukan kebijakan NEK Indonesia di sektor energi.

Dalam analisis terkait faktor yang mempengaruhi pembentukan kebijakan NEK Indonesia di sektor energi, peneliti menemukan bahwa faktor yang mempengaruhi pembentukan kebijakan ini, bukan hanya dipengaruhi faktor material seperti ekonomi dan politik tekanan global dalam upaya mitigasi perubahan iklim. Namun, pembentukan kebijakan ini juga dipengaruhi oleh konstruksi ide, diskursus kebijakan dan peran negara dalam merumuskan strategi mitigasi perubahan iklim yang komprehensif serta sejalan dengan kepentingan nasional dalam konteks ekonomi, politik, dan lingkungan Indonesia.

Lebih lanjut faktor yang mempengaruhi pembentukan kebijakan NEK di sektor energi terdiri atas dua faktor, diantaranya faktor pertama adalah ide dan diskursus kebijakan, dan yang kedua adalah negara sebagai aktor utama pembentuk kebijakan. Pertama, dengan analisis menggunakan *ideas-based state-centric theory*, ide dan diskursus mempunyai peranan penting dalam mempengaruhi pembentukan kebijakan terkait mitigasi perubahan iklim di suatu negara. Begitu pun dalam pembentukan kebijakan NEK di sektor energi, juga tidak terlepas dari bagaimana pengembangan ide dan diskursus di tingkat nasional dan internasional terkait urgensi ekonomi rendah karbon dan transisi energi. Pembahasan terkait ide kebijakan nilai ekonomi karbon menguat di Indonesia, dimulai sejak adanya kesadaran terhadap adanya dampak negatif emisi gas rumah kaca terhadap lingkungan dan urgensi Indonesia untuk penyesuaian kebijakan energi dengan komitmen internasional dalam perjanjian Paris yang telah diadopsi.

Selain itu, diskursus dalam ruang lingkup komunitas kebijakan yang berkembang, mulai dari lembaga riset, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga *non-government*, telah menjadi faktor kuat yang mendorong pembentukan kebijakan NEK di sektor energi dengan membagikan berbagai kajian dan diskusi tentang manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan dari kebijakan NEK, terkhusus di sektor energi. Peran para aktor *non-government* ini penting dalam pembentukan kebijakan NEK di sektor energi, karena dapat berfungsi sebagai jaringan komunitas keahlian yang dapat memberikan legitimasi ilmiah bagi kebijakan yang dibentuk atau diadopsi pemerintah.

Kedua, negara sebagai aktor utama pembentuk kebijakan menjadikan negara sebagai aktor sentral yang memegang peranan dalam pembentukan kebijakan perubahan iklim berdasarkan pertimbangan kepada kepentingan nasional. Mulai dari Presiden sebagai kepala pemerintah yang menetapkan komitmen, memberikan instruksi terkait kebijakan dan menjadi pengarah kebijakan. Kemudian, berlanjut kepada perpanjangan lembaga eksekutif, mulai dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang menjadi pusat penyelenggaran proses pembentukan kebijakan NEK di Indonesia, lalu Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang mengatur terkait regulasi, peraturan dan mekanisme kebijakan NEK di sektor energi. Lalu dalam persiapan pengawasan terkait pendanaan dalam kebijakan NEK terdapat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang bertanggung jawab terkait pengawasan dalam kebijakan NEK yang berbasis kebijakan ekonomi.

Pada akhir kesimpulan, peneliti menegaskan bahwa dari analisis ini, pembentukan kebijakan NEK di sektor energi Indonesia dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu ide dan diskursus serta peran negara sebagai aktor utama dalam pembentukan kebijakan luar negeri terkait mitigasi perubahan iklim. Dengan begitu, kebijakan NEK di sektor energi bukan hanya menjadi bagian dari respon Indonesia terhadap komitmen terkait isu perubahan iklim global, tetapi juga terkait dengan strategi kebijakan energi nasional dan mitigasi perubahan iklim Indonesia yang ingin melakukan penguatan terhadap daya saing sektor energi dan keberlanjutan ekonomi nasional yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan.

## 5.2 SARAN

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini jauh dari kata cukup, namun peneliti telah menempat usaha yang maksimal dalam melakukan analisis penelitian ini. Dengan analisis pada penelitian ini, mendapatkan hasil bahwa Kebijakan NEK Indonesia di sektor energi dipengaruhi oleh faktor peran ide dan diskursus kebijakan terkait mitigasi perubahan iklim, dan peran negara sebagai aktor utama dalam pembentukan kebijakan NEK Indonesia di sektor energi. Selanjutnya peneliti merekomendasikan pemerintah Indonesia agar terus memperkuat integrasi antara diskursus global mengenai ekonomi hijau yang berkelanjutan dan kebijakan domestik yang lebih baik seiring dengan perkembangan upaya dalam mitigasi perubahan iklim. Selain itu, peneliti juga berharap untuk pemerintah dapat melakukan peningkatan terkait transparansi kebijakan di sektor energi Indonesia kepada masyarakat agar dapat mencegah ketimpangan serta dapat menghimbau untuk partisipasi aktif lebih baik dari sektor swasta dan masyarakat. Terakhir, peneliti juga menyarankan kepada para peneliti selanjutnya menggunakan teori lainnya yang dapat melanjutkan analisis studi kasus ini lebih mendalam dan memiliki jangkauan lebih luas.

